



# Ranah Research :

## Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



## Analisis Kendala dan Solusi dalam Penerbitan SP2D di BPKD Padang Pariaman

Fani Izwar<sup>1</sup>, Syamsir<sup>2</sup>, Nia Aprilian<sup>3</sup>, Rafi Putra Kurniawan<sup>4</sup>, S. Amanda Putri<sup>5</sup>, Syakira Mishwa Hanifah<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [faniizwar06@gmail.com](mailto:faniizwar06@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [syamsirsaili@yahoo.com](mailto:syamsirsaili@yahoo.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [niaafriilian0804@gmail.com](mailto:niaafriilian0804@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [rafi.rpk86@gmail.com](mailto:rafi.rpk86@gmail.com)

<sup>5</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [s.amandaputri93@gmail.com](mailto:s.amandaputri93@gmail.com)

<sup>6</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [haramishwa@gmail.com](mailto:haramishwa@gmail.com)

Corresponding Author: [faniizwar06@gmail.com](mailto:faniizwar06@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Regional Financial Management Agency (BPKD) of Padang Pariaman Regency is tasked with managing the Padang Pariaman regional finances. One of the archives managed is the Fund Disbursement Order (SP2D). SP2D archives must be maintained properly because in some cases they can be used as authentic evidence. Problems often arise when managing and searching SP2D archives because there are no records of where the archives are stored. Therefore, a system is needed that can support this process. This system was built using the Laravel and Vue.JS frameworks. Laravel has various features that make the system development process easier, and Vue.Js is used because it allows the page display to be more responsive. This system uses QR codes to store SP2D archive location information. System development begins with data collection, system and database design using data flow diagrams (DFDs) and entity-relationship diagrams (ERDs), as well as implementing these diagrams into the system. The result of this development is a system that supports the process of managing and retrieving SP2D archives at BPKD Padang Pariaman Regency. Analysis of obstacles and solutions in issuing SP2D, to obtain information regarding the system and procedures for issuing Fund Disbursement Orders (SP2D) to Regional Financial Agencies, or Regional Financial Management Officials (PPKD), as Proxy of Regional General Treasurer (BUD). This SP2D is a letter used to disburse funds through the designated bank after the Payment Order is received by the BUD Attorney. The procedure starts from RKA-SKPD, DPA-SKPD, KAS-SKPD BUDGET, SPD, SPP, SPM and then SP2D is issued.*

**Keyword:** SP2D, BPKD, Abstacles and solution

**Abstrak:** Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman bertugas melakukan pengelolaan keuangan daerah Padang Pariaman. Salah satu arsip yang dikelola adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Arsip SP2D harus dijaga dengan baik karena dalam beberapa kasus dapat digunakan sebagai bukti otentik. Permasalahan sering muncul pada saat pengelolaan dan pencarian arsip SP2D karena tidak adanya catatan dimana arsip tersebut disimpan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung proses tersebut. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dan Vue.JS. Laravel memiliki berbagai fitur yang mempermudah proses pengembangan sistem, dan Vue.Js digunakan karena memungkinkan tampilan halaman menjadi lebih responsif. Sistem ini menggunakan kode QR untuk menyimpan informasi lokasi arsip SP2D. Pengembangan sistem dimulai dengan pengumpulan data, perancangan sistem dan basis data menggunakan data flow diagram (DFDs) dan entitas-relationship diagram (ERDs), serta mengimplementasikan diagram tersebut ke dalam sistem. Hasil dari pengembangan ini adalah suatu sistem yang mendukung proses pengelolaan dan pengambilan arsip SP2D di BPKD Kabupaten Padang Pariaman. Analisis kendala dan solusi dalam penerbitan SP2D, untuk memperoleh informasi mengenai system dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Keuangan Daerah, atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Selaku Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (BUD). SP2D ini merupakan surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar diterima oleh Kuasa BUD. Prosedur tersebut dimulai dari RKA-SKPD, DPA-SKPD, ANGGARAN KAS-SKPD, SPD, SPP, SPM dan kemudian terbitlah SP2D.

**Kata Kunci:** SP2D, BPKD, Kendala dan Solusi

## PENDAHULUAN

Saat ini, dunia berkembang sangat pesat dan batas antara informasi dan kebutuhan manusia semakin menyempit, terutama karena teknologi. Ketepatan dan kecepatan ini diperlukan dalam interaksi pemerintah dengan masyarakat, namun sayangnya, dalam hal pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat, tingginya mobilitas penduduk tidak sebanding dengan ketepatan dan kecepatan pemerintah. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin pesat, dan pembangunan dunia semakin mendesak. Dalam persaingan bisnis ini, perusahaan perlu meningkatkan secara signifikan kinerja para manajer internal khususnya. Peningkatan kualitas kinerja perusahaan sangat penting agar perusahaan dapat bersaing dan mencapai tujuannya.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajemen. (Nengsy dkk, 2013). (Frenni Ernisa et al. , 2017) Untuk mendukung pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap kinerja bisnis, diperlukan juga beberapa faktor lain yang dapat membuat partisipasi anggaran menjadi lebih efektif. Faktor lain yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komitmen organisasi dan motivasi. Perubahan dalam Peraturan Menteri ini salah satunya mengatur mengenai pelaksanaan dan pengelolaan belanja di lingkungan SKPD terkait dengan sistem dan tata cara penerbitan Surat Perintah Pencairan Keuangan (SP2D) yang berkaitan dengan pengelolaan penyerapan atau realisasi keuangan di daerah. menjadi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Departemen Pajak. ) Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Padang Pariaman berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. . Rumah Dinas Tahun 2006 jo Peraturan Rumah Dinas Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur administrasi memerlukan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung pelaksanaan SP2D edisi. Pengertian SP2D sendiri merupakan dokumen yang menjadi dasar pencairan dana dari BPKD Padang Pariaman. Pelayanan Penerbitan SP2D merupakan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Pada saat penerbitan SP2D, tidak semua dapat langsung dibatalkan karena masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan SPM sebagai berikut: B. 4. 444 kesalahan administrasi, ketidakpatuhan terhadap pagu anggaran, dan tidak ditandatanganinya PA/KPA. BPKD Padang Pariaman merupakan pusat pengelolaan keuangan daerah yang menyelenggarakan urusan pokok dan penunjang operasional pemerintahan daerah. BPKD mempunyai cara tersendiri dalam memverifikasi kebenaran SP2D berdasarkan pengeluaran yang diminta SKPD/pihak ketiga tanpa melebihi batas anggaran. Selain tersebut, penyampaian SP2D bersifat wajib sesuai Kebijakan Nasional Nomor 13 Tahun 2006.

## **METODE**

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan utama adalah mendalami pemahaman terhadap pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajemen, dengan mempertimbangkan konteks dan situasi khusus di daerah tersebut. Populasi penelitian terdiri dari para manajer internal perusahaan di sektor bisnis yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Sampel dipilih secara purposive, melibatkan manajer-manajer yang memiliki pengalaman dalam penyusunan anggaran dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Instrumen utama yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan kuesioner atau pedoman wawancara yang dikembangkan secara khusus. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan suasana terbuka, memungkinkan responden berbagi pandangan dan pengalaman secara rinci. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi temuan utama tentang partisipasi anggaran, komitmen organisasi, motivasi, dan dampaknya terhadap kinerja manajemen. Prinsip-prinsip etika penelitian dijunjung tinggi, dengan peserta diberikan informasi dan memberikan persetujuan sebelum wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **SP2D pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman.**

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman merupakan suatu proses yang memegang peranan penting dalam efisiensi penyaluran dana di tingkat daerah. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan dua kendala utama yang mempengaruhi proses ini, yakni lampiran pengajuan yang tidak lengkap dan ketidaktepatan waktu pengajuan. Kedua kendala ini menjadi faktor krusial yang dapat memperlambat penyaluran dana, terutama dalam mengakomodasi dinamika kebutuhan keuangan daerah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi kepada pelaku keuangan terkait merupakan solusi yang diusulkan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengajuan SP2D dilengkapi dengan lampiran yang sesuai dan diajukan pada waktu yang tepat. Implementasi solusi ini sangat tergantung pada pemahaman pihak yang mengantar pengajuan SP2D, sehingga mereka dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan dengan benar sebelum mengajukannya.

Proses penerbitan SP2D di BPKD Padang Pariaman, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara, dimulai dari surat permintaan pembayaran yang dibawa oleh bendahara sekolah ke dinas pendidikan. Selanjutnya, dinas pendidikan mengeluarkan SP2D yang dapat dicairkan di bank terkait. Tahapan ini menyoroti kompleksitas proses yang harus dijalani sebelum SP2D dapat diakui dan dana dapat disalurkan.

Wawancara juga mencatat bahwa SP2D dapat dicairkan dengan cepat, bahkan dalam satu hari, jika proses pengajuan dilakukan pada waktu pagi dengan lampiran yang lengkap. Faktor kelengkapan syarat lampiran menjadi krusial dalam memastikan kecepatan proses ini. Semakin cepat pengajuan dilakukan dan semakin lengkap dokumennya, semakin baik dan cepat SP2D dapat dicairkan.

Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap kendala dan solusi dalam penerbitan SP2D di BPKD Padang Pariaman ditekankan dalam penjelasan tersebut. Sosialisasi dianggap sebagai kunci utama untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pengetahuan yang sama mengenai persyaratan dan ketentuan SP2D. Selain itu, penekanan pada waktu pengajuan yang tepat juga dianggap dapat memberikan dampak signifikan terhadap kecepatan pencairan dana.

Proses penerbitan SP2D yang tergambar dari wawancara menunjukkan adanya serangkaian tahapan yang harus diikuti, dimulai dari surat permintaan pembayaran hingga proses pencarian dana di bank. Dalam konteks ini, peran dinas pendidikan sebagai penerbit SP2D diakui memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa setiap tahapan dijalankan dengan baik. Melalui pemahaman terhadap kendala, implementasi solusi yang tepat, dan peningkatan pemahaman pelaku keuangan, diharapkan BPKD Padang Pariaman dapat mengoptimalkan proses penerbitan SP2D, mempercepat penyaluran dana, dan secara keseluruhan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

## **Kendala dan solusi dalam penerbitan SP2D pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)**

### **A. Kendala Yang Dihadapi**

Dalam proses menjalankan tugas kontrol dalam sistem manajemen yang berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaan tugas tersebut, di antaranya:

#### **1. Kendala faktor eksternal**

Kendala eksternal adalah kendala yang disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan SKPD dalam menyelesaikan data yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Kendala-kendala ini termasuk yang berikut:

- a. Perlengkapan SPJ yang diubah terlalu lama;
- b. Tidak cukup dana untuk DPA-SKPD; dan
- c. Kesalahan pegetikan dokumen saat mengajukan SPM
- d. Tidak ada bubuhan tanda tangan pada dokumen SPJ saat pengajuan SPM tersebut;
- e. Tidak ada jumlah SPD yang cukup dari dana dokumen SPM yang diajukan; dan
- f. Tidak ada persetujuan yang sah antara para pihak

Sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hambatan eksternal adalah hambatan yang disebabkan oleh kesalahan PA-SKPD atau hambatan penyelesaian data. Kendala tersebut antara lain:

- a. Peralatan SPJ perlu diperbarui terlalu lama;
- b. Dana ilegal dimasukkan ke dalam DPA-SKPD; dan
- c. Dokumen SPM dimasukkan dengan salah.
- d. Dokumen SPJ permohonan SPM tidak memiliki tanda tangan.
- e. Nominal SPD dari usulan dana dokumen SPM tidak cukup.
- f. Kesepakatan antar pihak tidak berlaku.

#### **2. Kendala faktor internal**

Kesalahan internal, termasuk kekeliruan dan kesalahan, dan penundaan penerbitan SP2D, disebabkan oleh manajemen Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BUD): Ada masalah dengan aplikasi SIMDA pada server keuangan (milik BUD).

- a. Ini tertunda karena kesalahan dalam pencatatan register SP2D,
- b. Kesalahan dalam pengetikan pembuatan SP2D, dan
- c. Ini tertunda karena pejabat yang berwenang tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan dinas luar.
- d. Ada penghentian listrik dari PT. PLN  
kendala internal adalah kendala berupa kesalahan atau keterlambatan penerbitan SP2D yang disebabkan oleh pengelolaan Bagian Akuntansi dan Keuangan BUD (Bendahara Umum Daerah) Departemen Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
  - a. Aplikasi Simda bermasalah (error) pada server keuangan (milik BUD)
  - b. SP2D Registration Error Delay
  - c. Keterlambatan ini disebabkan karena adanya error pada build SP2D
  - d. Keterlambatan karena tidak adanya personel yang berwenang atau partisipasi dalam kegiatan luar dari dinas
  - e. Terjadi pemadaman listrik di PT.

## B. Cara Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, rapat internal dilakukan untuk menentukan titik masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini, kepala bidang akuntansi dan perbendaharaan mengeluarkan kebijakan berikut:

1. Mengatasi hambatan yang disebabkan oleh faktor eksternal:
  - a. Penolakan penerbitan SP2D tidak dapat diteruskan karena sudah melebihi tanggal pagu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - b. Penolakan dokumen SPM apabila dokumen SPM yang diajukan oleh SKPD mengalami kesalahan pengetikan atau cacat, yang memerlukan pembuatan SPM baru.
  - c. Menolak dokumen SPM jika tidak menerima pengesahan dari pejabat yang berwenang atau pihak ketiga.
  - d. Menolak dan membatalkan penerbitan SP2D jika sisa SPD dalam pengajuan SPM kurang karena jumlah sisa SPD dalam anggaran kas.
  - e. Jika tidak ada bubuhan persetujuan antara pihak kesatu dan pihak kedua dalam bentuk surat persetujuan atau bentuk lainnya.
2. Mengatasi masalah yang disebabkan oleh faktor internal:
  - a. Kesalahan dalam penulisan nomor register akan menyebabkan pembuatan SP2D tertunda; upaya untuk mengatasi masalah ini dengan membuat catatan baru dan melakukan penelitian yang lebih optimal.
  - b. Kesalahan dalam pengetikan pembuatan SP2D adalah yang paling penting, dan jika terjadi kesalahan, pengesahan akan ditolak oleh Bank Daerah Kabupaten Jombang; upaya untuk mengatasi masalah ini dengan membuat catatan yang baru dan melakukan penelitian yang lebih optimal.
  - c. Untuk mengurangi kesalahan, penghapusan data base sistem dalam aplikasi Simda akan memakan waktu lebih lama karena data aplikasi tersebut berhubungan dengan proses komputerisasi. Setelah data dihapus, verifikasi harus lebih hati-hati dan mengingatkan bendahara SKPD untuk mempersiapkan data untuk dokumen SPM dengan hati-hati..
  - d. Dalam kasus di mana pejabat yang berwenang tidak hadir atau mengikuti kegiatan di luar kantor, pencairan SP2D akan ditunda selama paling lama dua hari setelah tanda terima pengajuan SPM. Rapat internal diadakan dan setiap kebijakan diserahkan kepada atasan untuk menyelesaikan masalah ini.



## KESIMPULAN

Dalam konteks perkembangan pesat di era **teknologi** dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pemerintah dan perusahaan di Indonesia perlu meningkatkan kinerja mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Artikel ini menyoroti peran penting partisipasi dalam penyusunan anggaran sebagai faktor yang memengaruhi kinerja manajemen, dengan penekanan pada studi kasus di Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil wawancara mengungkapkan kendala-kendala utama dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di BPKD Padang Pariaman, seperti lampiran pengajuan yang tidak lengkap dan waktu pengajuan yang tidak tepat. Solusi yang diusulkan mencakup sosialisasi terhadap pelaku keuangan untuk memastikan pemahaman terhadap syarat dan ketentuan SP2D.

Proses penerbitan SP2D dan waktu pencairan yang cepat, terutama jika pengajuan dilakukan di pagi hari dengan syarat lampiran yang lengkap, menunjukkan bahwa efisiensi dapat dicapai dengan implementasi solusi yang tepat. Kesimpulannya, pemahaman mendalam terhadap kendala dan solusi dalam penerbitan SP2D sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, penerapan sosialisasi, pemahaman akan proses penerbitan SP2D, dan ketepatan waktu pengajuan dapat menjadi kunci sukses dalam mempercepat penyaluran dana dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kesimpulan ini mencerminkan urgensi peningkatan kualitas manajerial di tingkat internal perusahaan dan di ranah pelayanan publik untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## REFERENSI

- Awan Pribadi Basuki.2016.*Konsep dan Implementasi Laravel 5*. Yogyakarta: Lokomedia.
- D. Pramana, L. Yuningsih, “*Aplikasi Latih Tanding Futsal Menggunakan Framework Laravel*”, Jurnal Sistem dan Informatika (JSI), vol. 12, no. 1, pp. 48-55, Nov. 2017.
- Lutfi Gani. 2018.Panduan Praktis Menguasai Vue.Js. Yogyakarta: Lokomedia.
- Munandar, A. 2015. *Evaluasi Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin*. Jurnal KINDAI 11(2): 113-124.
- Nengsy, H., R. N. Sari dan R. Agusti. 2013. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information, Kepuasan Kerja dan Motivasi Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Akuntansi 2 (Oktober): 1-17
- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011